PENGARUH *RETURN ON EQUITY (ROE)*, UKURAN *(SIZE)*, DAN KEMAKMURAN *(WEALTH)* PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Surepno
NIM 7250408023

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Agus Wahyudin, M.Si	Dhini Suryandari, SE, M.Si, Akt
NIP. 196208121987021001	NIP. 198212142008122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Fachrurrozie, M.Si

NIP.196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Januari 2013

Penguji

Bestari Dwi Handayani, SE, M.Si, Akt
NIP.197905022006042001

Anggota I

Dr. Agus Wahyudin, M.Si
NIP. 196208121987021001

Anggota II

Dhini Suryandari, SE, M.Si, Akt
NIP. 198212142008122001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. S. Martono, M.Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, Desember 2012

Yang menyatakan,

Surepno

Nim 7250408023

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Perubahan dan perbaikan harus dimulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dimulai dari sekarang
- Sebaik-baik insan adalah insan yang bermanfaat bagi sesamanya
- *"Man Jadda wajada"* (Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)

Persembahan

Bapak dan ibu tercinta
Kakak dan adik tercinta
Teman-teman kos IR 29
Seluruh sahabat di Jurusan Akuntansi
Seluruh Civitas Akademika FE Unnes
Seluruh kawan di KSEI Unnes, Eksis Rohis FE Unnes, Hima Akuntansi, BEM FE, DPM FE, DPM KM Unnes, dan BEM KM Unnes

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Prakata

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh *Return On Equity* (ROE), Ukuran (*Size*), Dan Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia".

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Sudjiono Sastroatmodjo, M.Si, sebagai Rektor Universitas Negeri Seamarang.
2. Dr. S. Martono, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Agus Wahyudin, M.Si., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan laporan skripsi.
5. Dhini Suryandari, SE, M.Si, Akt., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan laporan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
7. Kedua orang tua, kakak, dan adik : Bpk Zaenuri, Ibu Tumisih, Eni Anjarwati, Selamet Hariyanto dan Minoto yang telah menjadikan inspirasi

dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi, Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

8. Seluruh sahabat mahasiswa Akuntansi (S1) angkatan 2008 yang telah memberikan dukungan moral dan pikiran.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penyusun

Surepno
7250408023

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

SARI

Surepno. 2012. "Pengaruh *Return On Equity* (ROE), Ukuran (*Size*), dan Kemakmuran (*Wealth*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Agus Wahyudin, M.Si. II. Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Akt.

Kata Kunci: Pemerintah Derah, ROE, Ukuran, Kemakmuran, Kinerja Keuangan.

Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerjanya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui kinerja sebuah entitas. Kinerja keuangan menjadi salah satu bagian yang perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnnya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini terlihat pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) masih kecil. Tahun 2010 hanya 9% pemerintah daerah yang mendapat opini audit WTP.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *Return On Equity* (ROE), ukuran (*size*), dan Kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang dinyatakan dengan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Populasi kemudian diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Analisis data dilakukan untuk menguji asumsi klasik dan uji hipotesis. Peneltian ini menggunakan dua variabel dependen. Sehingga dalam pengujian regresi berganda menggunakan dua model regresi. Model pertama menggunakan rasio Efisiensi dan model kedua menggunakan rasio efektivitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa variabel *Return On Equity* (ROE), ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) secara parsial berpangaruh terhadap kinerja keuangan untuk rasio efisiensi. pada model kedua yang menggunakan rasio efektivitas ROE dan kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan variabel ukuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan rasio efeektivitas. Secara simultan variabel *Return On Equity* (ROE), ukuran (*Size*), dan kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada kedua rasio efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Untuk kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah berada pada kategori kurang efisien. Sedangkan dengan menggunakan rasio efektivitas kinerja pemerintah daerah berada pada kategori sangat efektif.

ABSTRACT

Surepno. 2012. "The influence of Return On Equity, Size, Wealth to the financial performance of local government in Indonesia". Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor Dr. Agus Wahyudin, M.Si. Co Adviser. Dhini Suryandari, S.E, M.Si., Akt.

Keywords: Local Government, ROE, Size, Wealth, Financial Performance.

Local government is a public sector organization has an obligation to report the results of its performance. Measuring performance is critical to determine the performance of an entity. Financial performance into one part that needs to be measured. Financial performance measurement can be performed using analysis of financial statements. The problem in this study is still low financial performance of local governments in Indonesia. This can be seen in the results of the BPK to the financial statements of local governments that received unqualified opinions is still small. In 2010 only 9% of local government that gets Unqualified audit opinion.

The research was conducted in order to obtain empirical evidence related to the influence of Return On Equity, Size and Wealth to the financial performance of local governments in Indonesia, which is expressed by the ratio of effectiveness and efficiency ratios. This study used a population of local government financial statements districts/cities throughout Indonesia. The population then selected according to predetermined criteria. Data analysis was performed to test the classical assumptions and hypothesis testing. This research uses two dependent variables. Thus, in regression testing using two regression models. The first model uses the ratio of the second model uses Efficiency ratio and effectiveness ratio.

The results of this study show empirical evidence that the variable Return On Equity (ROE), size and wealth to be more influenced by partial financial performance for efficiency ratios. the second model that uses ROE and prosperity effectiveness ratios affect financial performance. While variable size does not affect the financial performance ratio efeectiveness. Variables simultaneously Return On Equity (ROE), size and wealth affect on the financial performance ratios on both efficiency and effectiveness.

Based on the above results it can be concluded that for the government's financial performance using the efficiency ratio of local government performance in the category of less efficient. While using the ratio of the effectiveness of local government performance in the category of very effective.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMA PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

PRAKATA vi

SARI viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 10

BAB II LANDASAN TEORI 11

2.1 Tinjauan Pustaka 11

2.1.1 Teori Agensi 11

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 12

2.1.2 *Return On Equity* (ROE) 18

2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) 20

2.1.4 Kemakmuran Pemerintah Daearah (*Wealth*)..... 21

2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daearah 23

2.2 Kerangka Berpikir 25

2.2.1 Hubungan *Return On Equity* (ROE) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 25

2.2.2 Hubungan Ukuran (*Size*) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29

2.2.3 Hubungan Kemakmuran (*Wealth*) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 31

2.3 Hipotesis 35

BAB III METODE PENELITIAN 36

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 36

3.2 Populasi, Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel 36

3.2.1 Populasi 36

3.2.2 Sampel 36

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel..... 37

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 38

3.3.1 Variabel Independen 38

3.3.2 Variabel Dependen 40

3.4 Metode Pengumpulan Data 43

3.5 Metode Analisis Data 43

3.5.1 Analisis Statistik Diskriptif 43
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 44
3.5.2.1 Uji Normalitas 44
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 44
3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas 45
3.5.3 Analisis Regresi Berganda 45
3.5.4 Pengujian Hipotesis 46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 49
4.1 Hasil Penelitian 49
4.1.1 Deskripsi data 49
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 50
4.1.2.1 Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 50
4.1.2.2 Deskriptif ROE 55
4.1.2.3 Deskriptif Ukuran (*Size*) 55
4.1.2.4 Deskriptif Kemakmuran (*Wealth*) 56
4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik 57
4.1.3.1 Uji Normalitas 58
4.1.3.2 Uji Multikolinieritas 60
4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas 62
4.1.4 Analisis Regresi Berganda 64
4.1.4.1 Persamaan Regresi 64
4.1.4.2 Uji Parsial 66
4.1.4.3 Uji Simultan 69

4.1.4.4 Analisis Koefisien Determinasi 71

4.2 Pembahasan 74

4.2.1 Deskriptif Variabel Penelitian 74

4.2.2 Pembahasan Pengujian Hipotesis 78

4.2.2.1 Pengaruh ROE terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 77

4.2.2.2 Pengaruh Ukuran (*Size*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 78

4.2.2.3 Pengaruh Kemakmuran (*Wealth*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 80

4.2.2.5 Pengaruh ROE, Ukuran (*Size*), dan Kemakmuran (*Wealth*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 81

BAB V PENUTUP 83

5.1 Kesimpulan 83

5.2 Saran 85

5.2.1 Saran Bagi Pihak Pemerintah 85

5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 86

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN 89

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
3.1 Operasionalisai Variabel Penelitian 42

4.1 Deskripsi Kinerja Keuangan Pemerintah Derah untuk Rasio Efektivitas.. 51

4.2 Data Kelas Interval Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

untuk Rasio Efektivitas 52

4.3 Deskripsi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Rasio Efisiensi ... 53

4.4 Data Kelas Interval Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

untuk Rasio Efektivitas 54

4.5 Deskriptif Variabel ROE 55

4.6 Deskriptif Variabel *Size* 56

4.7 Deskriptif Variabel *Wealth* 57

4.8 Uji Normalitas Model 1 58

4.9 Uji Normalitas Model 2 59

4.10 Hasil Uji Multikolinieritas Model 1 60

4.11 Hasil Uji Multikolinieritas Model 2 61

4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1 62

4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2 63

4.13 Hasil Regresi Model 1 64

4.14 Hasil Regresi Model 2 65

4.15 Hasil Pengujian Parsial Model 1 67

4.16 Hasil Pengujian Parsial Model 2 68

4.17 Hasil Pengujian Simultan Model 1 69

4.18 Hasil Pengujian Simultan Model 2 70

4.19 Hasil Koefisien Determinasi Model 1..... 71

4.20 Hasil Penelitian Model 1..... 72

4.21 Hasil Koofisien Determinasi Model 2..... 73

4.22 Hasil Penelitian Model 2..... 74

4.23 Tingkatan Kategori Data Penelitian..... 71

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian Tahun 2009 89

Lampiran 2 Data Penelitian Tahun 2010 90

Lampiran 3 Data Variabel Independen dan Dependen 92

Lampiran 4 Output SPSS Model 1..... 94

Lampiran 5 Output SPSS Model 2..... 98

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi (Mardiasmo, 2009). Melihat kondisi yang demikian pemerintah tampaknya harus berupaya memperbaiki kinerjanya. Pemerintah daerah yang juga termasuk dalam organisasi sektor publik perlu melakukan perbaikan kinerja. Kinerja keuangan menjadi bagian penting yang perlu mendapat perbaikan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang efektif dan efisien. Kinerja yang menjadi sorotan tentu adalah kinerja keuangan dari pemerintah daerah. Berbeda dengan organisasi sektor privat, pemerintah daerah yang merupakan organisasi sektor publik bukanlah organisasi yang berorientasi pada profit atau laba. Pemerintah daerah sebagai organisasi nonprofit lebih menekankan kepada pelayanan kepada publik. Jadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan organisasi sektor privat secara substansial berbeda.

Kinerja pemerintah daerah diukur melalui seberapa besar output dan *outcome* yang dihasilkan. Karena itu tuntutan baru muncul agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerjanya melalui prinsip *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Konsep *value for money* pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan sebuah daerah. Prinsip *value for*

money dalam hal pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip *value for money* juga perlu didukung dengan partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik.

Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah di tuntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban *(responsibility centers)* sebagai unit pelaksana (Mardiasmo, 2009).

Mardiasmo (2009) juga menjelaskan bahwa Terwujudnya *good governance* memerlukan reformasi kelembagaan (*institusional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Kebijakan Moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan pemerintah pusat mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya mereformasi kelembagaan melalui pembatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka

diperlukan reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang dicanangkan dalam reformasi birokrasi adalah terciptanya indeks efektifitas pemerintahan yang ideal. Di dalam peraturan tentang ukuran dan kriteria keberhasilan reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa World Bank menetapkan skala yang digunakan untuk indeks efektivitas pemerintahan adalah dari -2,5 (*bad governance*) sampai +2,5 (*good governance*). Pada tahun 2009 indeks efektifitas pemerintahan Indonesia sebesar -2,1. Data tersebut menunjukkan bahwa belum efektifnya pemerintahan di Indonesia. Maka diperlukan sebuah evaluasi untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien melalui analisis kinerja keuangan. Tujuannya adalah sebagai standar penilaian dan perbaikan di masa yang akan datang. Langkah tersebut telah dimulai setelah diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mendukung kinerja pemerintah terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purpose activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat (Mardiasmo, 2009). Salah satu tujuan akuntansi adalah untuk mengukur kinerja sebuah entitas. Kebutuhan akan analisa kinerja keuangan sebuah perusahaan tentunya diperlukan dalam setiap periode. Perlu sebuah pengukuran kinerja tiap periode yang mampu menjelaskan tingkat keberhasilan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Pemerintah daerah sebagai sebuah organisasi publik menjadi salah satu objek yang perlu dinilai kinerja

keuangannya setiap tahun. Dalam upaya pemerintah daerah mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan sebuah evaluasi kinerja terhadap pemerintah daerah. Salah satunya adalah menggunakan analisis rasio. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim, 2004:150)

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk pengawasan serta evaluasi sebuah organisasi baik itu organisasi sektor publik maupun organisasi sektor privat. Pengukuran kinerja merupakan elemen yang penting dalam rangka perbaikan kinerja dan evaluasi di masa mendatang. Wood dalam Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Di Indonesia sendiri kinerja pemerintah daerah masih menjadi sorotan. Fakta memperlihatkan bahwa masih buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pada tahun 2010 BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mempublikasikan bahwa baru 9 persen atau 32 pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari 358 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah daerah) yang telah di audit oleh BPK. Hal ini masih jauh dari target yang dicanangkan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu 60 persen pemerintah daerah harus mendapatkan opini WTP pada tahun 2014. Namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari opini audit

WTP tahun 2009 yang hanya di peroleh 14 LKPD kemudian meningkat menjadi 32 LKPD di tahun 2010 di seluruh Indonesia.

Otonomi daerah membuka peluang daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karakteristik daerah. Karakteristik sebuah daerah ternyata juga turut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitiaan dari Sumarjo (2010) yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan secara simultan dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah daerah. Variabel yang digunakan yaitu ukuran (*size*), tingkat kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage* dan *intergovermental revenue.* Hasilnya hanya tingkat kemakmuran (*wealth*) dan ukuran legislatif yang tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan hanya pada ukuran (*size*) dan kemakmuran (*wealth*). Hal ini dikarenakan variabel ukuran (*size*) sering digunakan untuk menjelaskan karakteristik dari perusahaan sektor privat. Maka untuk variabel ukuran (*size*) dianggap mampu menjelaskan karakteristik dari pemerintah daerah yang diasumsikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sumarjo (2010) yang menggunakan variabel Ukuran (*size*) yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. variabel *size* di ukur dengan menggunakan total aktiva atau total aset dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk kemakmuran (*wealth*) dipilih

karena terjadi perbedaan hasil penelitian. Penelitian Sumarjo (2010) menjelaskan tentang kemakmuran (*wealth*) yang di ukur dengan PAD. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran (*wealth*) tidak berbengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun di dalam penelitian Florida (2006) dibuktikan secara empiris bahwa PAD berpengaruh positif secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu peneliti mencoba meneliti kembali pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pallis et al. (2006) melakukan penelitian pada pemerintah daerah di Yunani dengan menggunakan rasio keuangan di sektor swasta yaitu ROA, ROE, *revenue growth, net profit growth, net profit margin, liquidity, capital adequacy.* Dalam penelitian tersebut meneliti 12 pemerintah daerah di Yunani. Secara empiris dijelaskan dalam penelitian Pallis et al. (2006) bahwa posisi keuangan tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rahardjo (2010) melakukan penelitian terkait rasio keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa rasio keuangan sebagian besar berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rahardjo (2010) menggunakan 9 rasio keuangan yaitu *return on equity ratio, return on assets ratio, profit margin ratio, current ratio, debt to equity ratio, long term liabilities to assets ratio, assets turnover ratio, operating revenues to total revenues,* dan *operating revenues to operating expenses.* Hasilnya penelitiannya menemukan bukti secara empiris bahwa hanya variabel *profit margin ratio, current ratio,* dan *debt to equity ratio*

yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada satu tahun dan dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah ROE. Hal ini dikarenakan rasio ROE terbukti secara empiris berpengaruh terhadap PAD di pemerintah yunani (Cohen dalam Rahardjo, 2010). ROE juga sering digunakan dalam peneltiaan kinerja keuangan di sektor privat maupun sektor publik. Berbeda dengan sektor privat, menurut Rahardjo (2010) pemerintah daerah yang memiliki nilai ROE yang tinggi dapat di indikasikan bahwa kinerja keuangannya kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memiliki rasio ROE yang tinggi akan berdampak pada kinerjanya untuk tahun berikutnya. Rahardjo (2010) menyatakan bahwa tingginya angka rasio ROE dapat menurunkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Halacmi (2005) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan metode yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini sangat penting karena kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi untuk setiap periodenya dengan tujuan perbaikan kinerja secara berkala. Penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai organisasi pada sektor publik dan akuntansi pemerintahan. Berdasarkan paparan diatas dan fakta empiris yang tersaji di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Return On Equity (ROE)*, Ukuran (*Size*), Dan Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Derah di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Equity ratio* (ROE) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Apakah ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
3. Apakah kemakmuran (*wealth*) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
4. Apakah *Return On Equity (ROE)*, Ukuran (*Size*), Dan Kemakmuran (*Wealth*) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?

4. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Equity (ROE)*, Ukuran (*Size*), Dan Kemakmuran (*Wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bukti empiris yang dapat menjelaskan tentang pengaruh *Return On Equity* (ROE), ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan dan bisa menjadi tambahan literatur di Fakultas Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

   Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan analisis terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat mengambil langkah yang bersifat korektif dalam menempuh kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya memperbaiki kinerja keuangannya. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memperlihatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam upaya mengukur tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai media informasi bagi masyarakat maupun *stakeholders* untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Kinerja keuangan pemerintah daerah mulai menjadi topik yang sering diteliti diantaranya dilakukan oleh Rahardjo (2010), Sumarjo (2010) serta Hamzah (2007). Penelitian ini lebih mengacu pada penelitian Sumarjo (2010). Namun variabel independen yang digunakan hanya pada variabel ukuran (*size*) pemerintah daerah dan kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah. Perbedaan selanjutnya adalah penambahan variabel independen yaitu *Return On Equity* (ROE) dan penambahan variabel dependen yaitu rasio efektivitas. Untuk variabel dependen, penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penjelasan hal-hal dan variabel yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi yang dijelaskan oleh Jansen dan Meckling dalam Santoso dan Joni (2012) adalah hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Teori agensi sering digunakan dalam penelitian akuntansi. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Sihite

dalam sesotyaningtyas (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa teori keagenan ini telah dipraktekkan pada sektor publik, termasuk pemerintah daerah di Indonesia. Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih (*voter*) atau rakyat. implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku opportunistik (*opportunistic behaviour*). Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

Konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan dimana agen tidak memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan prinsipal tetapi lebih cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dengan cara megabaikan kepentingan pemilik. Hal ini juga bisa terjadi pada organisasi sektor publik dimana pemerintah sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat sebagai pihak prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah.

Teori agensi menjadi grand teori dalam penelitian ini. Masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan

pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarkat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.

Dua sisi kepentingan yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik. Publik seringkali tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah selaku agen lebih mementingkan kesejahteraan sendiri. Hal ini seperti dikemukakan pada harian Kompas dapat dilihat dari sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen, melebihi belanja untuk pelayanan publik. Maka dari itu diperlukan pelaporan kinerja dari pemerintah daerah selaku agen untuk mempertanggung jawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat. Maka diperlukan regulasi untuk mengatur perbedaan kepentingan ini. Regulasi ini akan sangat menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah. Adanya lembaga pengawas berupa legislatif termasuk didalamnya memerankan pengendalian terhadap kinerja keuangan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau

kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan standar pemerintah (SAP, 2005). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran), Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat di gunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntansi sektor publik

memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Secara garis besar menurut Wiratraman (2009), tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*);
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus menurut Wiratraman (2009), tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;

4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
    a. untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;
    b. untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah;
    c. untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
    d. untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equity*).

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan, maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2003. Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 laporan keuangan yaitu meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP RI No.24 Tahun 2005 laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PP RI No. 24 Tahun 2005). Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

1) Kas dan setara kas
2) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang
3) Piutang pajak dan bukan pajak
4) Persediaan
5) Aset tetap
6) Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
7) Ekuitas dana

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas dalam satu periode

akuntansi dan saldo kas dan saldo setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran (PP RI No. 24 Tahun 2005).

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.1.3 *Return On Equity* (ROE)

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kinerja sebuah perusahaan perlu dilakukan suatu analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Mengadakan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan sebuah perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat dipakai oleh seorang manajer untuk mengetahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai dimasa lalu dan masa yang sedang berjalan. Dengan analisis tersebut akan dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan negara juga tidak lepas dari laporan keuangan.

Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan tersebut akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Tidak semua pengguna laporan keuangan mampu

memahami isi laporan keuangan tersebut, maka untuk membantu pemahaman terhadap isi laporan keuangan diperlukan sebuah analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Terdapat berbagai jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Rasio keuangan yang dipakai dalam organisasi sektor privat biasanya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Hasil dari perhitungan rasio-rasio tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai evaluasi kinerja dari sebuah organisasi dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini salah satu rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas yaitu *return on equity ratio.* Rasio kinerja dengan ukuran ROE telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Cohen et al. (2006) menggunakan ROE dalam penelitiannya untuk menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Yunani. ROE merupakan perbandingan antara antara jumlah surplus atau defisit anggaran dengan jumlah *equity* pemerintah daerah. Hasil penelitian Cohen et al. (2006) menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk di Yunani.

ROE memjadi rasio yang dapat menunjukkan kualiataas pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Surplus anggaran yang tinggi dapat mengindikasikan penggunaan anggaran yang belum optimal untuk kepentingan publik. Nilai ROE dapat mewakili rasio profitabilitas dalam sektor swasta. Kemampuan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki akan membantu menilai tingkat penggunaan ekuitas untuk

memperoleh laba. ROE menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan analisis untuk menilai posisi keuangan sebuah entitas.

2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*)

Penelitian terdahulu mengenai ukuran dalam sektor swasta dilakukan oleh Cooke (1992) dan Ramasamy et al. (2005). Penelitian yang dilakukan oleh Ramasamy et al. (2005) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran sebuah perusahaan terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar tentunya akan memiliki tekanan lebih besar terhadap kinerjanya.

Sumarjo (2010) memasukkan variabel ukuran (*size*) pemerintah sebagai karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan proksi nilai aktiva yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Terbukti secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai aktiva dari pemerintah daerah dapat diasumsikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerahnya. Tuntutan terhadap pemerintah yang mempunyai ukuran lebih besar akan lebih tinggi dari pada pemerintah yang mempunyai ukuran lebih kecil. Sehingga akan berdampak pada kinerja keuangannya. Dalam penelitian ini proksi untuk menjelaskan *size* adalah jumlah total aset pemerintah daerah.

Entitas yang memiliki ukuran besar memberikan harapan kepada publik untuk memberikan kontribusi dan pelayanan yang tinggi. Perusahaan besar akan mendapat sorotan lebih dari semua pihak yang berkepentingan

dengan perusahaan tersebut. Pemerintah daerah dengan *size* besar sangat diharapkan untuk memberikan pelayanan optimal kepada publik. Harapan dan tuntutan terhadap pemerintah daerah akan memacu kinerja pemerintah daerah.

2.1.5 Kemakmuran Pemerintah Daerah (*Wealth*)

Kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat di lihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) memakai variabel kemakmuran dengan menggunakan proksi PAD untuk menjelaskan kemakmuran sebuah daerah. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah.

Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak kepada tingkat kinerja yang lebih baik. PAD merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah yang tentunya akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah teradap pemerintah pusat. Di berlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. Dalam penelitian sebelumnya Sumarjo (2010) belum terbukti secara empiris bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2004)

menyebutkan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2004) pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat terjadinya pendapatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Halim (2004) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Menurut Halim (2004), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah; 2) bagian laba lembaga keuangan bank; 3) bagian laba lembaga keuangan non bank; dan 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; 2) penerimaan jasa giro; 3) penerimaan bunga deposito; 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik dilakukan oleh pribadi maupun sebuah organisasi. Kinerja dapat dikatakan baik apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2009). Perhatian yang besar terhadap

pengukuran kinerja pemerintah daerah sangat diperlukan hal ini disebabkan oleh sebuah opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Halacmi (2005) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktivitas pada organisasi sektor publik.

Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melihat tingkat efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip *value for money*.

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan obyektif. Selain itu kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Terjadinya peningkatan atau penurunan produktivitas bisa ditunjukkan dari kegiatan ini. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Halim (2004) informasi yang termasuk dalam pengukuran kinerja antara lain (1) Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang

dan jasa; (2) Kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); (3) Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; serta (4) Efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Kinerja pemerintah daerah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan sisi input, output, dan outcome secara bersama-sama. Konsep *Value for Money* adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator ekonomi, efisien dan efektif. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengertian efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi (Mardiasmo, 2009).

2.2 Kerangka Berpikir

2.2.1 Hubungan *ROE* dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Gambaran kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat pada rasio yang dihasilkan dari informasi sebuah laporan keuangan. Menurut PSAK No.1 (2008) agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan

pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu. Analisis informasi keuangan sangat bermanfaat untuk mengetahui kinerja sebuah entitas. Kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dari hasil analisis rasio yang diperoleh dari laporan keuangan. Kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan keuangan pemerintah telah diuji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Rasio keuangan yang digunakan diantaranya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio struktur modal, dan rasio kinerja keuangan (Sutaryo, et al. 2012). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan entitas dalam menyediakan pengambilan keuangan dengan sumberdaya yang digunakan. rasio profitabilitas yang sering digunakan diantaranya adalah *return on asset, return on equity* dan *profit margin.*

Penelitian tentang pengaruh posisi keuangan telah dilakukan oleh Rahardjo (2010) untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. ROE menjadi salah satu variabel yang digunakan oleh Rahardjo dalam penelitiannya. Hasilnya ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik untuk rasio efisiensi maupun rasio efektivitas. ROE diperlukan demikian penting karena merupakan ukuran efisiensi yang dicapai perusahaan dalam mendayagunakan modal (*Equity*) yang di investasikan atau presentase pengembalian (*Return*) kepada pemilik dari investasinya dalam perusahaan (Nainggolan, 2008).

Ditemukan bukti secara empiris dalam penelitian Rahardjo (2010) bahwa ROE berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. ROE telah digunakan sebelumnya oleh Cohen et al. (2006) untuk menggambarkan kinerja keuangan pemerintah di Yunani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE berpengaruh terhadap PAD dan jumlah penduduk di pemerintah Yunani. Jones dan Walker dalam Rahardjo (2010) menggunakan ROE dalam menghubungkan *Financial Ratio* pemerintah daerah di Australia dengan *distress* pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE berpengaruh terhadap *distres* pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan terhadap publik.

Kegunaan rasio keuangan dalam memberikan informasi untuk menilai kinerja keuangan sebuah entitas dewasa ini sangat diperlukan. Akuntabilitas dan pertanggung jawaban entitas terhadap *stakeholders* menjadi hal yang sangat penting. Kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan menjadi sorotan utama dalam manajemen sebuah entitas. Analisis rasio akan mendukung entitas untuk memprediksi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang akan datang.

ROE menjadi salah satu rasio yang bisa digunakan untuk memprediksi dan menilai kinerja dari entitas. Pada sektor swasta tingginya nilai ROE dapat menunjukkan bahwa kualitas entitas dalam keadaan baik. Hal ini mampu memberikan gambaran yang ideal tentang kinerja perusahaan. Sebaliknya pemerintah daerah yang merupakan entitas *non profit oriented* berbeda analisanya dalam hal menentukan dan menilai ROE. ROE dalam sektor publik dihitung dengan menggunakan nilai surplus (defisit) anggaran dibanding dengan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah.

Surplus (defisit) anggaran yang tinggi memperlihatkan bahwa pemerintah daerah kurang baik dalam pelaksanaan anggarannya. Surplus anggaran tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan anggaran yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada publik. Surplus anggaran juga mempengaruhi anggaran tahun berikutnya. Jika anggaran yang telah ditetapkan terjadi surplus maka secara otomatis anggaran untuk tahun berikutnya akan mengalami penurunan. Penurunan anggaran yang terjadi akan berdampak pada penurunan alokasi dana yang dibutuhkan ditahun mendatang. Anggaran yang turun tentu akan berdampak pada penurunan kinerja sebuah entitas.

Defisit anggaran yang tinggi juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menutup pengeluaran atau belanja daerah. Surplus (defisit) akan sangat berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Kualitas kinerja yang optimal tentu memerlukan pengelolaan anggaran yang baik. Pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tentu sudah menentukan alokasi dana yang dibutuhkan tiap tahunnya. Jadi nilai surplus (defisit) memiliki pengaruh terhadap kinerja untuk tahun berikutnya. Jika pengelolaan APBD dapat dilakuakan secara optimal tentu akan menunjang kinerja keuangan pemerintah daerah.

ROE yang menjadi salah satu rasio untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran memiliki hubungan terhadap kinerja keuangan. Ketika nilai ROE tinggi maka dapat mengindikasikan pengelolaan anggaran belum berjalan optimal. Semakin tinggi nilai ROE maka akan memiliki dampak

terhadap kinerja tahun berikutnya. Maka diperlukan sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang optimal.

2.2.2 Hubungan Ukuran (*Size*) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Size merupakan skala yang digunakan untuk menghitung nilai dan secara langsung akan menunjukkan besar-kecilnya suatu objek dengan kapasitas tertentu, salah satunya yaitu pengukuran dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi *size* menjadi tolak ukur paling tepat untuk menilai sesuatu diantaranya yang berhubungan dengan materialitas. Ukuran dalam penelitian ini menggunakan nilai total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Hubungan dengan teori keagenan muncul ketika pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola aset daerah untuk kepentingan publik. Hal ini tentu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah jika memiliki aset yang besar.

Yunanto (2010) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *intelectual capital disclosure*. Hal ini bisa terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran pemerintah daerah tentang *value added* yang diperoleh dari pengungkapan *intelectual capital.* Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Barako, Hancock dan Izan dalam Yunanato (2010) mengemukakan bahwa organisasi besar memiliki banyak pengalaman sehingga menurunkan biaya informasi dan mempunyai sumber daya untuk menyampaikan informasi yang lebih banyak kepada

stakeholder untuk meningkatkan transparansi organisasi sehingga menurunkan konflik agensi, menarik investor dan menaikkan reputasi.

Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan meimiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan dari publik lebih besar dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih kecil. Menurut Cooke dalam Sumardjo (2010) perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik. Berdasarkan penelitian Sumarjo (2010) ditemukan bukti secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini proksi untuk menjelaskan ukuran (*size*) adalah total aset. Total aset digunakan karena di anggap lebih stabil dibandingkan nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar di sektor swasta (Wuryaningsih, 2002). Bukti empiris di perlihatkan dalam penelitian Sumarjo (2010) bahwa ukuran (*size*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian di sektor swasta sering menggunakan ukuran (*size*) perusahaan sebagai variabel yang mampu mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramasamy *et al.* Dalam Sumarjo

(2010) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran (*size*) terhadap kinerja sebuah perusahaan di sektor swasta. Perusahaan yang memiliki ukuran besar di tuntut oleh publik untuk melakukan pengungkapan wajib yang akan berdampak pada peningkatan kinerja. Tekanan untuk pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih besar akan lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih kecil.

Lesmana (2010) menemukan bukti secara empiris bahwa ukuran (*size*) berpengaruh terhadap pengungkapan wajib oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan cenderung memberikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan yang memiliki informasi lengkap dan baik dapat memberikan gambaran tentang baiknya kinerja dari pemerintah daerah. Dapat diasumsikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah akan berdampak pada upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan kinerja yang lebih baik. Karena tekanan yang besar dari publik akan mendorong sebuah organisasi untuk memberikan kinerja yang terbaik. Kinerja yang baik dapat diperlihatkan oleh tingkat efektifvitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan sebuah organisasi.

2.2.3 Pengaruh Kemakmuran (*Wealth*) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat saat ini masih sangat besar. Hal ini membuat pemerintah daerah kurang mandiri dalam melakukan kinerjanya. Ketergantungan ini akan berdampak pada kualitas kinerja pemerintah daerah.

apabila pemerintah daerah terlalu banyak bergantung pada pemerintah pusat maka akan sulit untuk berkembang.

Penelitian Yunanto (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intelectual capital* pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah ternyata tidak mampu memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas melalui pengungkapan *intelectual capital* kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Meningkatnya PAD diharapkan pemerintah akan memberikan informasi yang lebih kepada stake holder sebagai sarana pertanggung jawaban kepada publik. Tetapi dalam hal ini pemerintah daerah belum memiliki tingkat kesadaran terhadap pengungkapan *intelektual capital* dalam laporan keuangannya.

Otonomi daerah yang sekian lama telah berjalan diharapkan mampu memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya. Pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada alokasi dana perimbangan. Salah satu hal yang dapat menunjang kemandirian sebuah daerah adalah dengan meningkatkan PAD. PAD bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun sumberdaya atau kekayaan yang dimiliki daerah itu sendiri. PAD Kemakmuran sebuah daerah bisa menjadi ukuran bahwa daerah memiliki keunggulan dibanding dengan daerah lain. Kemakmuran (*wealth*) diukur menggunakan PAD, karena melalui PAD yang tinggi sebuah daerah tidak akan terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Dalam penelitian yang dilakukan Florida (2006) telah

dibuktikan secara empiris bahwa PAD secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun Sumarjo (2010) menemukan bukti secara empiris bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Melihat dua hasil yang berbeda dalam hal pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang terhadap PAD.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sebagian besar APBD bersumber dari transfer pemerintah pusat. Suhardjanto dkk. (2010) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat sekitar 80%-98% dari APBD. PAD yang merupakan sumber pendapatan internal pemerintah daerah saat ini cukup memberikan kontribusi meskipun masih kecil. Daerah yang memiliki PAD tinggi menggambarkan tingkat kemakmuran yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Menurut Saragih (2003) peningkatan nilai PAD dari sebuah daerah merupakan indikator tumbuhnya perekonomian sebuah daerah.

Penelitian mengenai PAD telah banyak dilakukan diantaranya adalah Hadi dkk. (2003) yang menjelaskan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap jumlah belanja modal pemerintah daerah. Penelitian mengenai PAD juga dilakukan oleh Florida (2006) dengan hasil penelitian PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Fitriyanti dan Pratolo (2009) juga menemukan bukti empiris bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui PAD pemerintah akan mampu secara

mandiri menunjang kinerjanya dan akan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai PAD sebuah daerah akan mampu meningkatkan kinerjanya.

Pengelolaan potensi tiap daerah akan sangat menentukan besar kecilnya PAD yang diperoleh. Struktur APBD yang ada memperlihatkan PAD masih relatif kecil. Namun sebenarnya potensi yang dimiliki oleh tiap daerah masih berpeluang besar untuk ditingkatkan. PAD menjadi satu-satunya pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Sehingga PAD tinggi setidaknya menjadi nilai positif bagi sebuah daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas tentang keterkaitan antara ROE, ukuran dan kemakmuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah maka dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:

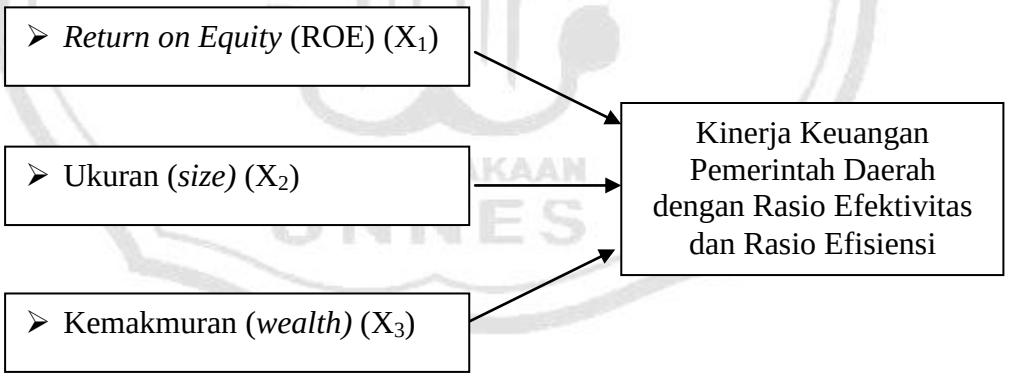

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut :

H_1 : Terdapat pengaruh *return on equity ratio* (ROE) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_2 : Terdapat pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_3 :Terdapat pengaruh kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_4 : Terdapat pengaruh *Return On Equity ratio* (ROE), ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh *Return On Equity* (ROE), ukuran (*size*) dan kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan data yang dipakai adalah data sekunder. Data yang diambil adalah data keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Data keuangan diperoleh melalui website dari dirjen perimbangan keuangan.

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Indonesia tahun 2009 dan tahun 2010.

3.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) akan menjadi sampel karena dianggap telah memenuhi seluruh syarat kelengkapan laporan keuangan yang dibutuhkan dan diharapkan mampu menjadi gambaran pemerintah daerah yang kinerja keuangannya baik. Dengan menggunakan sampel pemerintah daerah yang medapat opini wajar tanpa pengecualian diharapkan tidak terjadi

perbedaan nilai *adj R square* yang besar dan tidak mempengaruhi hasil pengujian data dalam penelitian ini. Dalam penelitian Rahardjo (2010) terjadi perbedaan hasil yang cukup besar diantara dua model penelitian karena masih menggunakan sampel penelitian wajar dengan pengecualian.

3.2.3 Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria sampel berikut ini :

a. Sampel adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2009 dan 2010 yang telah daudit oleh BPK RI dengan mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).
b. Sampel adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah dipublikasikan dalam Dirjen Perimbangan Keuangan Negara serta mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel independen

Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel yang dapat diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi (Sarwono, 2012). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari :

a. *Return On Equity* (ROE)

Cohen et al. (2006) menggunakan ROE dalam penelitiannya untuk menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Yunani. ROE merupakan perbandingan antara antara jumlah surplus atau defisit anggaran dengan jumlah *equity* pemerintah daerah. Hasil penelitian Cohen et al. (2006) menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk di Yunani. Dalam penentuan rasio ROE menggunakan data surplus dan defisit anggaran. Jika pemerintah daerah mempunyai surplus yang tinggi maka pemerintah daerah akan mempunyai angka rasio yang tinggi dan sebaliknya. Tingginya angka rasio ROE mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam menggunakan anggaran yang telah diajukan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu tingginya angka rasio ROE dapat menurunkan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran pada tahun berikutnya. Untuk menentukan ROE dapat digunakan perhitungan berikut ini.

$$ROE : \frac{Surplus\ (Defisit) Anggaran}{Ekuitas\ Dana}$$

b. Ukuran (*Size)*

Ukuran (*size)* dapat diukur menggunakan total aset, jumlah karyawan, total pendapatan, dan tingkat produktifitas (Damanpour dalam Sumarjo, 2010). Dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan jumlah total aset pemerintah daerah. Baber dalam Suamrjo (2010) mengunakan populasi penduduk untuk mengukur ukuran (*size*). Penelitian Wuryaningsih dalam Sumarjo (2010) menggunakan nilai total aset sebagai ukuran (*size*) pada sektor swasta dan nilai aktiva atau total aset dianggap lebih stabil dibandingkan dengan nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Sumarjo (2010) juga menggunakan nilai aktiva sebagai proksi dari ukuran (size). Karena dianggap lebih stabil maka dalam penelitian ini total aset pemerintah daerah digunakan dalam mengukur *size.*

c. Kemakmuran *(Wealth)*

Menurut Abdullah (2004), kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat diukur melalui jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini tingkat kemakmuran juga diukur menggunakan PAD. Hal ini dikarenakan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh langsung dari wilayah tersebut. Jadi semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran suatu daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. PAD adalah hasil yang diperoleh dari kekayaan lokal dari pemerintah daerah yang nantinya akan mampu menopang kebutuhan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel independen. Variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan variabel independen (Sarwono, 2012). Kinerja keuangan pemerintah di ukur dengan menggunakan dua rasio sebagai berikut:

1. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka pemerintah daerah dapat dikategorikan kinerja keuangannya telah efisien. Dengan mengetahui perbandingan hasil realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran rasio efisiensi, maka penilaian kinerjanya dapat ditentukan. Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas maka dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80%-90% adalah cukup efisien, 60%-80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien (Hamzah, 2007). Perhitungan rasio efisiensi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2009).

$$Rasio\ Efisiensi : \frac{Realisasi\ Pengeluaran}{Realisasi\ Penerimaan}$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004). Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Apabila presentase kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90%-100% adalah efektif, 80%-90% adalah cukup efektif, 60%-80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif (Hamzah, 2007). Perhitungan rasio efektivitas diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2009).

$$Rasio\ Efektivitas : \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD}$$

PERPUSTAKAAN UNNES

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Skala	Pengukuran
1.	*Return On Equity* (X_1)	Perbandingan antara jumlah surplus atau defisit anggaran dengan jumlah ekuitas pemerintah daerah	Rasio	*Net Surplus (Defisit)/ Equity*
2.	Ukuran *(Size)* (X_2)	Ukuran dari pemerintah daerah yang diukur melalui nilai total aset	Nominal	Total aset dari pemerintah daerah
3.	Kemakmuran (*Wealth*) (X_3)	Kemakmuran dari pemerintah daerah yang diukur melalui nilai PAD	Nominal	Jumlah PAD yang di miliki pemerintah daerah
4.	Rasio Efektifitas (Y_1)	kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan	Rasio	Realisasi PAD/Target Penerimaan PAD
5.	Rasio Efisiensi (Y_2)	Rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah	Rasio	Realisasi Pengeluaran/ Realisasi Penerimaan

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu informasi yang diperoleh melalui pihak lain. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Data LKPD yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari LKPD tahun 2009 dan tahun 2010 yang dipublikasikan dalam website Dirjen Perimbangan Keuangan Negara melalui situs www.djpk.depkeu.go.id dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2011 dari BPK RI yang diperoleh melalui situs www.bpk.go.id.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk menampilkan statistik deskriptif dari penelitian dapat menggunakan beberapa cara. Anatara lain adalah menggunakan distribusi frekuensi dan presentase, tendensi sentral dan dispersi. Distribusi frekuensi merupakan dasar bagi satatistik deskriptif dan menjadi prasayarat untuk membuat grafik serta untuk menggambarkan seperangkat data. Tendensi sentral adalah nilai rata-rata dari setiap distribusi data. Contoh bilangan dalam tendensi sentral adalah *mean, median*, dan *mode.* Dispersi adalah distribusi nilai dalam kaitannya dengan kategori-kategori khusus. Pengukuran variasi dalam dispersi diantaranya adalah range, mean deviasi, disperse deviasi (Sarwono, 2012).

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk melakukan pengujian data observasi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal mempunyai pola distribusi seperti kurva berbentuk bel (Sarwono, 2012:95). Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan di gunakan alat uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikasi variabel dependen memiliki nilai signifikasi lebih dari 5%. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2007). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerence* dan *Variance Factors (VIF)* dengan alat bantu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). *Tolerence* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak di jelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerence* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/*Tolerence.*

Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerence* < 0.5 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila ternyata dalam metode terdapat multikolinieritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier diantara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk *first difference* atau delta (Ghozali, 2007).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Sebuah Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar) (Ghozali, 2007). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan uji Glesjer dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0,05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan variabel independen yaitu ROE, ukuran (*size),* dan kemakmuran (*wealth)* terhadap

variabel dependen yaitu rasio efektifitas dan efisiensi. Dalam analisis regresi berganda juga akan dilakukan uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Model yang digunakan adalah seperti berikut ini.

Model 1 :

RES = $\alpha + \beta_1$ *ROE* $+ \beta_2$ *SIZE* $+ \beta_3$ WLTH+ e

Model 2 :

REK = $\alpha + \beta_1$ *ROE* $+ \beta_2$ *SIZE* $+ \beta_3$ WLTH+ e

Notasi :

RES = Rasio Efisiensi

REK = Rasio Efektivitas

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

ROE = *Return on Eqiuty*

SIZE = Ukuran pemerintah daerah

WLTH = Kemakmuran

e = *error*

3.5.4

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis di lakukan untuk mengetahui pengaruh ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas dan efisiensi. Langkah-langkah analisis pengujian model dan hipotesis adalah berikut ini:

a. Pengujian Koefisien Regresi (signifikansi-t)

Merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikansi-t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

1) H_0 diterima H_a ditolak: $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau *p-value* >1%, 5% dan 10%, variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) H_0 ditolak H_a diterima: $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau *p-value* <1%, 5% dan 10%, variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Pengujian Koefesien Regresi Simultan (Uji signifikansi-F)

Merupakan pengujian variabel independen yang dilakukan secara bersama–sama untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikan dalam penelitian ini sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), dengan kriteria sebagai berikut:

Jika tingkat signifikan < 0,05, maka H*a* diterima.

Jika tingkat signifikan > 0,05, maka H*a* ditolak.

Sedangkan hipotesis alternatif ($H4$) yang akan diuji yaitu:

$H4$ = ROE, ukuran (*Size*) dan kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Model analisis regresi secara simultan yang digunakan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Y: a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3}$$

Keterangan:

Y :Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Kemandirian)

b_1 :ROE

b_2 :Ukuran (*Size*)

b_3 :Kemakmuran (*Size*)

a :Konstanta

b_1 , b_2 , b_3 :Koefisiensi variabel bebas

c. Koefisien Determinasi ($R^{2)}$

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel independen dan juga berfungsi untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen berupa ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) dan variabel dependen berupa rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan target populasi dan syarat yang telah ditetapkan untuk proses memperoleh data penelitian. Data penelitian menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009 dan 2010. Data penelitian awal berjumlah 476 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2009 dan 491 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2010.

Data penelitian awal yang digunakan sebanyak 967 laporan keuangan pemerintah daerah. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling.* Kriteria untuk menjadi sampel adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini audit wajar tanpa pengcalian (WTP) dan tersedia semua informasi yang dibutuhkan sebagai syarat terpenuhinya semua data penelitian. Untuk tahun 2009 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria adalah 11 pemerintah daerah dari 476 yang diseleksi. Sedangkan untuk tahun 2010 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria sebanyak 22 pemerintah daerah dari 491 yang diseleksi. Setelah melalui proses seleksi sampel dengan syarat yang telah ditentukan didapatkan 33 laporan keuangan pemerintah daerah yang akan menjadi sampel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan

dua persamaan regresi untuk menguji hipotesis. Persamaan regresi pertama untuk mengetahui pengaruh ROE, ukuran (*size*) dan kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Persamaan regresi kedua untuk mengetahui pengaruh ROE, ukuran (*size*) dan kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan memberikan informasi mengenai karakteristik dari variabel penelitian yang digunakan. Karakteristik variabel tersebut dapat digambarkan melalui nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimal), serta nilai standar deviasi. Berikut analisis statistik dekriptif yang akan diuraikan tiap variabel yang ada.

4.1.2.1 Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini ditunjukan melalui rasio efektivitas dan efisiensi. Rasio efektivitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pemerintah daerah dengan cara realisasi pengeluaran dibandingkan realisasi penerimaan. Hasil Analisis deskriptif dan pembagian kelas interval untuk variabel kinerja keuangan pemerintah daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Rasio Efektivitas

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja keuangan pemerintah (Rasio Efektivitas)	33	,64	1,126	1,0258	,13832
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data yang diolah, 2012

Hasil analisis deskriptif berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan, bahwa rata-rata untuk variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio efektivitas sebesar 1,0258, dan standar deviasi sebesar 0,13832. Maka kecenderungan variabel dependen dari rasio efektivitas pada penelitian ini adalah pada rata-ratanya (*mean*) karena nilai *mean* yaitu 1,0258 lebih besar dari nilai pada nilai standar deviasi yaitu 0,13832, maka kategori untuk kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio efektivitas adalah sangat efektif pada pemerintah daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini.

PERPUSTAKAAN UNNES

Tabel 4.2 Data Kelas Interval Kinerja Keuanngan Pemerintah Daerah untuk Rasio Efektivitas

Persentase	Kinerja Keuangan Pemerintah (Rasio Efektivitas)		Kategori
	N	%	
<60 %	0	0	Tidak Efektif
60 % - 80 %	2	6	Kurang Efektif
80 % - 90 %	2	6	Cukup Efektif
90 % - 100 %	11	33	Efektif
>100 %	18	55	Sangat Efektif
Jumlah	33	100	

Sumber: Data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 18 atau 55% dari pemerintah daerah termasuk dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkategori sangat efektif. 11 atau 33% pemerintah daerah termasuk dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkategori efektif, 2 atau 6% pemerintah daerah termasuk dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkategori kurang efektif. 2 atau 6% pemerintah daerah termasuk dalam kinerja keuangan tidak efektif. Data pemerintah daerah terbanyak dari keseluruhan data penelitian yaitu sebanyak 18 atau 55% pemerintah daerah termasuk dalam kategori pemerintah yang memiliki kinerja keuangan yang sangat efektif.

PERPUSTAKAAN UNNES

Tabel 4.3 Deskripsi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Rasio Efisiensi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja keuangan pemerintah (Rasio Efisiensi)	33	.87	1.07	.9861	.05292
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data yang diolah, 2012

Hasil analisis deskriptif berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan, bahwa rata-rata untuk variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio efisiensi sebesar 0,9861 dan standar deviasi sebesar 0,05292. Maka kecenderungan variabel dependen dari rasio efisiensi pada penelitian ini adalah pada rata-ratanya (*mean*), karena nilai *mean* yaitu 0,9861 lebih besar dari pada nilai standar deviasi yaitu 0,05292, maka kategori untuk kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio efisiensi adalah kurang efisien pada pemerintah daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini.

PERPUSTAKAAN UNNES

Tabel 4.4 Data Kelas Interval Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Rasio Efisiensi

Persentase	Kinerja Keuangan Pemerintah (Rasio Efektivitas)		Kategori
	N	%	
<60 %	0	0	Sangat Efisien
60 % - 80 %	0	0	Efisien
80 % - 90 %	3	9	Cukup Efisien
90 % - 100 %	17	52	Kurang Efisien
>100 %	13	39	Tidak Efisien
Jumlah	33	100	

Sumber: Data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 17 atau 52% dari pemerintah daerah termasuk dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkategori kurang efisien. 13 atau 39% pemerintah daerah termasuk dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkategori tidak efisien, 3 atau 9% pemerintah daerah termasuk dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkategori cukup efisien. Data pemerintah daerah terbanyak dari keseluruhan data penelitian yaitu sebanyak 17 atau 52% pemerintah daerah termasuk dalam kategori pemerintah yang memiliki kinerja keuangan yang kurang efisien.

4.1.2.2 Deskriptif ROE

ROE pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan perbandingan antara nilai surplus/defisit anggaran dengan nilai ekuitas pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai surplus anggaran dari pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap tingginya nilai ROE. Semakin tinggi nilai ROE berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena jika nilai surplus anggaran pemerintah daerah tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum

sepenuhnya menggunakan anggarannya untuk kepentingan masyarakat. Analisis deskriptif untuk variabel ROE disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Deskriptif Variabel ROE

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROE	33	-,03	,32	,0132	,05852
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data yang diolah, 2012

Variabel independen pertama dalam analisis deskriptif ini adalah ROE pemerintah daerah, dimana nilai rata-ratanya sebesar 0,0132, dan standar deviasi 0,05852. Dengan standar deviasi sebesar 0,05852 berarti kecenderungan adalah pada standar deviasi karena nilai standar deviasi yaitu 0,05852 lebih besar dari nilai *mean* yaitu 0,0132. Oleh karena itu kategori untuk ROE pemerintah daerah dalam analisis deskriptif ini tergolong kategori rendah.

4.1.2.3 Deskriptif Ukuran (*Size)*

Ukuran (*size)* dalam penelitian ini diukur menggunakan total aset. Total Aset memiliki sifat yang stabil dan dapat dijadikan proksi untuk menjelaskan ukuran pemerintah daerah. Semakin besar aset pemerintah daerah maka semakin besar ukuran pemerintah daerah. Aset tersebut nantinya dapat digunakan untuk menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil Analisis deskriptif dan pembagian kelas interval untuk variabel ukuran (*size)* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Ukuran (*Size*)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	33	4.29E6	7.26E5	2.1046E6	1.04521E
Valid N	0				

Sumber: Data yang diolah, 2012

Variabel independen kedua dalam analisis deskriptif ini adalah ukuran (*size*) pemerintah daerah dengan menggunakan total aset, dimana nilai rata-ratanya sebesar 2,104 dan standar deviasi sebesar 1,045. Karena nilai *mean* yaitu 2,104 lebih besar dari pada nilai standar deviasi yaitu 1,045. Maka kategori untuk *size* pemerintah daerah dalam analisis deskriptif ini cenderung pada nilai rata-rata (mean) dan masuk dalam kategori pemerintah daerah yang memiliki ukuran (*size)* yang besar dengan ukuran nilai total aset yang dimiliki.

4.1.2.4 Deskriptif Kemakmuran (*Wealth*)

Kemakmuran adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kemakmuran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD dipilih karena merupakan kekayaan riil sebuah daerah yang berasal dari potensi dan sumber daya yang dimiliki. Hasil Analisis deskriptif dan pembagian kelas interval untuk variabel kemakmuran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Deskriptif Variabel Kemakmuran

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	33	1850.00	3.73E5	9.2569E4	8.47160E4
Valid N	33				

Sumber: Data yang diolah, 2012

Variabel independen ketiga dalam analisis deskriptif ini adalah kemakmuran, dimana nilai rata-ratanya sebesar 9,256 dan standar deviasi sebesar 5,276. Oleh karena itu kecenderungan pada nilai *mean* karena nilai *mean* yaitu 9,256 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 5,276 maka kategori untuk kemakmuran pemerintah daerah adalah tinggi pada sampel penelitian ini.

4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukannya pengujian regresi, peneliti wajib melakukan pengujian terhadap data penelitian untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan klasik (normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas). Penyimpangan klasik yang terdapat pada data penelitian dapat menimbulkan hasil penelitian tidak akurat. Berikut hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi suatu data penelitian. Menurut Ghozali (2011) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu: Analisis grafik dengan melihat titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan analisis statistik dengan melihat *skewness* dan *kurtosis*, dan uji *one-sample kolmogorov-smirnov*.

Pengujian kenormalan data dalam penelitian ini menggunakan analisis *one-sample kolmogorov-smirnov*. Peneliti memutuskan untuk memilih analisis *one-sample kolmogorov-smirnov* karena analisis ini memiliki keakuratan yang cukup tinggi dibanding analisis grafik. Dalam analisis *one-sample kolmogorov-smirnov* kenormalan data dapat dilihat dari kriteria *Asymp. Sign* > 0,05 atau ketidaknormalan data dapat dilihat dari kriteria *Asymp. Sign* < 0,05. Sedangkan Uji Normalitas dapat dilihat dari Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Normalitas Model 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03359626
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.079
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		.597
Asymp. Sig. (2-tailed)		.869

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012

data penelitian yang terlihat pada Tabel 4.8 sudah terdisbrusi normal yaitu nilai

Asymp. Sign > 0,05. data penelitian berdistribusi normal dengan nilai *Asymp. Sign* sebesar 0,869.

Tabel 4.9 Uji Normalitas Model 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08257763
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.509
Asymp. Sig. (2-tailed)		.958

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012

data penelitian yang terlihat pada Tabel 4.9 sudah terdistribusi normal yaitu nilai *Asymp. Sign* > 0,05. data penelitian berdistribusi normal dengan nilai *Asymp. Sign* sebesar 0,958.

PERPUSTAKAAN UNNES

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Multikolinieritas mengkibatkan adanya hubungan yang erat antara variabel, sehingga multikolinieritas akan mengakibatkan diterima hipotesis nol.

Penelitian ini menggunakan nilai cut off yang umum dipakai untuk mengukur ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu data penelitian. Sedangkan kriteria pengukuran multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Berikut disajikan pengujian multikolonieritas pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas Model 1

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROE	.852	1.158
	TA	.841	1.162
	PAD	.810	1.213

a. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai *value inflating factor* (VIF) untuk semua variabel lebih kecil dari 10. Hasil nilai tolerance dan VIF pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa data dari penelitian ini terbebas dari penyakit multikolinieritas.

PERPUSTAKAAN UNNES

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas Model 2

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROE	.857	1.167
	TA	.864	1.158
	PAD	.809	1.236

a. Dependent Variable: Efektivitas

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai *value inflating factor* (VIF) untuk semua variabel lebih kecil dari 10. Hasil nilai tolerance dan VIF pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa data dari penelitian ini terbebas dari penyakit multikolinieritas.

4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada data yang penyimpangan terlalu jauh. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan berbagai cara, namun peneliti memutuskan untuk menggunakan salah satu cara yaitu Uji *Park.* Kriteria pengukuran heterokedastisitas dalam Uji *Park* dengan melihat tingkat signifikan semua variabel. Heterokedastisitas terdeteksi dalam suatu data jika variabel memiliki nilai signifikan < 0,05. Berikut disajikan pengujian heterokedastisitas pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.030	.009		3.382	.002
	ROE	.094	.068	.264	1.395	.174
	TA	-3.704E-9	.000	-.185	-.984	.333
	PAD	2.164E-8	.000	.088	.451	.655

a. Dependent Variabel: Efisiensi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa probabilitas (*sig*) dalam tiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam semua model regresi penelitian ini.

Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2

PERPUSTAKAAN

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.070	.023		3.066	.005
	ROE	-.119	.170	-.139	-.701	.489
	TA	-4.530E-10	.000	-.009	-.048	.962
	PAD	-2.701E-8	.000	-.046	-.223	.825

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa probabilitas (*sig*) dalam tiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam semua model regresi penelitian ini.

4.1.4 Analisis Regresi Berganda

4.1.4.1 Persamaan Regresi

Analisis Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat.

Hasil perhitungan regresi dengan mengunakan program SPSS 19 dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Regresi Model 1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.947	.015		61.602	.000
	ROE	-.430	.115	-.475	-3.732	.001
	TA	1.337E-8	.000	.264	2.082	.046
	PAD	1.839E-7	.000	.294	2.246	.032

a. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

Dari Tabel 4.13 dari persamaan regresi, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 0,947 + -0,430 ROE + 1,337E-8 *Size* + 1,839E-7 *Wealth* +e

1. Constant = 0,947 (positif), artinya bila ROE, ukuran (*size)*, kemakmuran (*wealth*) adalah 0, maka kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar = 0,947
2. Koefisien b_1 = -0,430 (negatif), artinya bila ROE meningkat 1 % maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -0,430
3. Koefisien b_2 = 1,337E-8 (positif), artinya bila ukuran (*size*) meningkat 1 % maka akan diikuti peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,337E-8
4. Koefisien b_3 = 1,839E-7 (positif), artinya bila kemakmuran (*wealth*) meningkat 1 % maka akan diikuti peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,839E-7

Tabel 4.14 Hasil Regresi Model 2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.932	.038		24.687	.000
	ROE	-1.177	.283	-.498	-4.160	.000
	TA	2.548E-8	.000	.193	1.614	.117
	PAD	5.976E-7	.000	.366	2.970	.006

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

Dari Tabel 4.14 dari persamaan regresi, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 0,932 - 1,177 ROE + 2,548E-8 *Size* + 5,976E-7 *Wealth* +e

1. Constant = 0,932 (positif), artinya bila ROE, ukuran (*size)*, kemakmuran (*wealth*) adalah 0, maka kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar = 0,932
2. Koefisien b_1 = -1,177 (negatif), artinya bila ROE meningkat 1 % maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -1,177
3. Koefisien b_2 = 2,548E-8 (positif), artinya bila ukuran (*size*) meningkat 1 % maka akan diikuti peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 2,548E-8
4. Koefisien b_3 = 5,976E-7 (positif), artinya bila kemakmuran (*wealth*) meningkat 1 % maka akan diikuti peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 5,976E-7

4.1.4.2 Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu-persatu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Parsial model 1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.947	.015		61.602	.000
	ROE	-.430	.115	-.475	-3.732	.001
	TA	1.337E-8	.000	.264	2.082	.046
	PAD	1.839E-7	.000	.294	2.246	.032

a. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

1. Hasil uji-t untuk Ha_1 diperoleh angka -3,372 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai signifikan untuk variabel ROE menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 0.05 yang menyimpulkan bahwa diterimanya Ha_1 atau adanya pengaruh ROE terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio efisiensi.
2. Hasil uji-t untuk Ha_2 diperoleh angka 2,082 dengan nilai signifikan sebesar 0,046. Nilai signifikan untuk variabel ukuran menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 0.05 yang menyimpulkan bahwa diterimanya Ha_2 atau adannya pengaruh ukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio efisiensi.
3. Hasil uji-t untuk Ha_3 diperoleh angka 2,246 dengan nilai signifikan sebesar 0,032. Nilai signifikan untuk variabel ukuran kemakmuran menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 0.05 yang menyimpulkan bahwa

diterimanya Ha_3 atau adanya pengaruh kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio efisiensi.

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Parsial model 2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.932	.038		24.687	.000
	ROE	-1.177	.283	-.498	-4.160	.000
	TA	2.548E-8	.000	.193	1.614	.117
	PAD	5.976E-7	.000	.366	2.970	.006

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

1. Hasil uji-t untuk Ha_1 diperoleh angka -4,160 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel ROE menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 0.05 yang menyimpulkan bahwa diterimanya Ha_1 atau adanya pengaruh ROE terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio efektivitas.
2. Hasil uji-t untuk Ha_2 diperoleh angka 1,614 dengan nilai signifikan sebesar 0,117. Nilai signifikan untuk variabel ukuran menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 0.05 yang menyimpulkan bahwa ditolaknya Ha_2 atau tidak adannya pengaruh ukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio efektivitas.

3. Hasil uji-t untuk Ha_3 diperoleh angka 2,970 dengan nilai signifikan sebesar 0,006. Nilai signifikan untuk variabel ukuran kemakmuran menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 0.05 yang menyimpulkan bahwa diterimanya Ha_3 atau adanya pengaruh kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio efektivitas.

4.1.4.3 Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas tehadap variabel tidak bebas secra simultan (bersama-sama). Hasil pengujian simultan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Simultan Model 1

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.053	3	.018	14.314	.000[a]
	Residual	.036	29	.001		
	Total	.090	32			

a. Predictors: (Constant), PAD, TA, ROE

b. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

Hasil Uji-F pada Tabel 4.17 untuk menguji pengaruh ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 14,314 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi Tabel 4.17 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio efisiensi.

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Simultan Model 2

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.394	3	.131	17.456	.000[a]
	Residual	.218	29	.008		
	Total	.612	32			

a. Predictors: (Constant), PAD, TA, ROE

b. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

Hasil Uji-F pada Tabel 4.18 untuk menguji pengaruh ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 17,546 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi Tabel 4.18 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dari rasio efektivitas.

4.1.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Kelemahan mendasar penggunaan koefesiensi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu banyak peneliti

menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R Square (Adj* R^2*)* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Adjusted R Square (Adj R^2*)* sebagai syarat dilakukannya Uji-F dan Uji-t. *Adjusted* R^2 menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabilitas variabel independen secara simultan terhadap variabilitas variabel dependen (Ghozali, 2009). Hasil koefisiensi determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel 4.19 Hasil Koefisien Determinasi Model 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773[a]	.597	.555	.03529

a. Predictors: (Constant), PAD, TA, ROE

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2011.

Hasil koefisien determinasi *Adjusted R Square (Adj* R^2*)* diperoleh nilai sebesar 0,555 atau kemampuan ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*), untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio efisiensi sebesar 55,5%. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain sebesar 44,5%.

Hasil *Adjusted R Square* dalam mengukur kemampuan ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah bernilai positif yaitu 55,5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dapat dilakukannya Uji-t dan Uji-F karena variabel tersebut terbukti memiliki

pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil penelitian pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Hasil Penelitian Model 1

H	Keterangan	Hasil
Ha_1	ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima
Ha_2	Ukuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima
Ha_3	Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima
Ha_4	ROE, Ukuran, dan Kemakmuran, berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

PERPUSTAKAAN UNNES

Tabel 4.21 Hasil Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802[a]	.644	.607	.08674

a. Predictors: (Constant), PAD, TA, ROE

Hasil koefisien determinasi *Adjusted R Square (Adj* R^2*)* diperoleh nilai sebesar 0,607 atau kemampuan ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*), untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio efektivitas sebesar 60,7%. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain sebesar 39,3%.

Hasil *Adjusted R Square* dalam mengukur kemampuan ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*wealth*) untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah bernilai positif yaitu 60,7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dapat dilakukannya Uji-t dan Uji-F karena variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil penelitian pada Tabel 4.21.

Tabel 4.22 Hasil Penelitian Model 2

H	Keterangan	Hasil
Ha_1	ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima
Ha_2	Ukuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Ditolak
Ha_3	Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima
Ha_4	ROE, Ukuran, dan Kemakmuran, berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

4.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan temuan secara keseluruhan yang diperoleh setelah dilakukannya proses pengolahan data. Pembahasan tersebut selanjutnya akan dipaparkan sebagai berikut:

4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel dalam penelitian digunakan untuk memberikan karakteristik atau gambaran suatu data penelitian. Karakteristik atau gambaran data penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23 Tingkatan Kategori Data Penelitian

Variabel Penelitian	Kategori
Rasio Efisiensi	Kurang Efisien
Rasio Efektivitas	Sangat Efektif
ROE	Rendah
Ukuran (*Size*)	Tinggi
Kemakmuran (*Wealth*)	Tinggi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012.

Berdasarkan tabel 4.22 mengenai data penelitian menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki kategori yang berbeda. Untuk kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efsiensi hasilnya masuk dalam kategori kurang efisien. Sedangkan kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efektivitas masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini

menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan dua rasio yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Rasio efisiensi menggambaran kinerja pemerintah daerah masih memerlukan perbaikan karena masuk dalam kategori kurang efisien. Sedangkan untuk rasio efektivitas menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang ditetapkan dengan realisasinya. Rasio efektivitas masuk dalam kategori sangat efekktif. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang menjadi sampel sudah baik dilihat dari segi efektivitasnya. Berdasarkan Tabel 4.20 menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah yang menjadi sampel untuk rasio efisiensi kinerja keuangannya masih kurang efisien. Hal ini ditunjukkan pada realisasi pengeluaran yang lebih besar dari realisasi penerimaan. Sedangkan yang menggunakan rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel sebagian besar masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini dapat ditunjukkan pada realisasi PAD yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

ROE pemerintah daerah dalam penelitian ini masuk dalam kategori yang rendah. Variabel ROE didapatkan dari nilai surplus atau defisit dibagi dengan nilai ekuitas pemerintah daerah. ROE masuk dalam kategori rendah karena sebagian besar sampel pemerintah daerah miliki nilai surplus yang kecil bahkan beberapa memiliki defisit anggaran. Surplus (defisit) anggaran yang terjadi masih relatif kecil sehingga pemerintah mampu menggunakan dana anggaran secara proporsional.

Ukuran (*Size*) pemerintah daerah di Indonesia dalam penelitian ini memiliki kategori yang tinggi. Variabel *size* yang diukur menggunakan total aktiva dapat menunjukkan besar kecilnya ukuran pemerintah, sedangkan dari tabel deskriptif menunjukkan bahwa total aktiva terbesar berada pada kategori tinggi yang dapat menunjukkan bahwa dalam penelitian ini menggunkan data kota/kabupaten terbanyak dengan ukuran pemerintah daerah yang besar.

Kemakmuran pemerintah daerah di Indonesia dalam penelitian ini memiliki kategori yang tinggi. Banyaknya data yang berkategori tinggi menunjukan bahwa kota/kabupaten yang digunakan dalam penelitian ini memiliki PAD yang cukup besar. Semakin besar nilai PAD yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin besar masuk dalam kategori daerah yang memiliki kemakmuran yang tinggi.

4.2.2 Pembahasan Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian, yang terkait dengan judul, permasalahan dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Hasil pengujian terhadap hipotesis dikembangkan secara ringkas sebagai berikut:

4.2.2.1 Pengaruh ROE terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dibenarkan karena nilai surplus akan mempengaruhi kinerja keuangan untuk tahun berikutnya. Jika pemerintah daerah memiliki surplus tinggi akan

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Surplus yang tinggi dapat mengindikasikan pemerintah daerah belum mampu menyerap sepenuhnya anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat. ROE memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar nilai ROE maka maka semakin kecil kinerja pemerintah daerah. Namun sebaliknya semakin kecil nilai ROE maka semakin besar kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan sampel yang digunakan rata-rata pemerintah daerah berada pada defisit anggaran. Defisit anggaran ini berada dalam jumlah yang wajar sehingga secara positif akan mendukung kinerja pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah daerah yang dijadikan sampel secara kualitas laporan keuangan masuk dalam kategori baik. Surplus pemerintah daerah dapat menunjukkan kualitas penyerapan dana yang digunakan untuk melayani kepentingan publik. Organisasi publik selalu dituntut untuk menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien. Porsi anggaran yang seimbang akan menciptakan efisiensi dari anggaran. ROE memiliki andil dalam menunjukkan kualitas penggunaan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2010). ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Berdasarkan analisis data yang dilakukan variabel ROE berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah baik untuk rasio efisiensi maupun rasio efektivitas.

4.2.2.2 Pengaruh Ukuran (*Size*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Size hanya berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menggunakan rasio efisiensi. Hal ini dapat dijadikan pembenaran tentang *size* yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian mengenai adanya pengaruh *size* terhadap kinerja keuangan pemerintah juga sesuai dengan penelitian Sumarjo (2010) dan Ramasamy dkk (2005) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *size* terhadap kinerja keuangan.

Dalam sektor swasta ukuran perusahaan sangat dominan dalam menunjang pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Ukuran yang besar memiliki konskuensi akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah daerah yang merupakan sebuah entitas yang tidak akan pernah lepas tanggung jawab laporan keuangan. Semakin besar sebuah entitas maka semakin besar tanggung jawab yang harus dipublikasikan terkait kinerjanya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap kepentingan publik akan dituntut untuk memiliki kinerja keuangan yang baik. Karena dalam hakikatnya anggaran pemerintah daerah merupakan milik publik yang harus dikelola semaksimal mungkin.

Size yang besar dalam sektor pemerintahan akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Kemajuan daerah khususnya kemajuan di bidang infrastruktur akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumarjo (2010) menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah semakin besar tuntutan masyarakat untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik seiring dengan *size* pemerintahan yang besar. Sehingga dengan adanya *size* yang besar pemerintah daerah dapat memacu kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Dari hasil penelitian ini dibuktikan secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang menggunakan rasio efisiensi. Sedangkan rasio untuk rasio efektivitas ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini jelas berbeda dengan model pertama yang menggunakan rasio efisiensi. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh pada tingkat efektivitas kinerja keuangannya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah karena ukuran yang besar tidak menjamin pemerintah daerah untuk mewujudkan target PAD yang telah ditetapkan. pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar maupun kecil memiliki potensi yang sama untuk merealisasikan PAD yang ditargetkan. Jadi secara empiris dapat dibuktikan bahwa nilai total aset yang tinggi atau ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efektivitas.

4.2.2.3 Pengaruh Kemakmuran (*Wealth*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menunjukkan kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Sumarjo (2010) dengan hasil kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Florida (2006) yang menemukan bukti secara empiris bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penelitian Sumarjo (2010) kemakmuran pemerintah daerah tidak berpengaruh. PAD daerah dianggap masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Sehingga PAD memiliki kontribusi yang kecil dalam mendukung kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Florida (2006) melakukan penelitian pengaruh PAD terhadap kinerja pemerintah daerah baik secara parsial maupun simultan. Untuk pengaruh secara parsial hanya pajak dan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan secara simultan PAD berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Seiring berjalannya otonomi daerah pemerintah daerah lebih mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk memperoleh PAD yang tinggi. Meskipun sumbangsih PAD masih relatif kecil

untuk pembangunan. Namun PAD tetap memiliki kontribusi riil untuk menunjang kemandirian daerah.

Dalam penelitian ini variabel kemakmuran diukur dengan menggunakan PAD. PAD adalah hasil kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. PAD yang tinggi dari sebuah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kemakmuran yang tinggi. Dengan memiliki PAD yang besar pemerintah daerah tidak akan sepenuhnya bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentu akan menunjang sebuah daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja keuangannya secara mandiri.

4.2.2.4 Pengaruh ROE, Ukuran (*Size*), dan Kemakmuran (*Wealth*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dari Rasio Efisiensi

Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ROE, ukuran (*size*), dan kemakmuran (*Wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan rasio efisiensi maupun rasio efektivitas. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai signifikan F untuk kinerja keuangan yang menggunakan rasio efisiensi sebesar 0,000 < 0,05 dan besarnya pengaruh yang diberikan adalah sebesar 55,5% dan sisanya 44,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Sedangkan hasil nilai signifikan F untuk kinerja keuangan yang menggunakan rasio efektivitas sebesar 0,000 < 0,005 dan besarnya pengaruh yang diberikan adalah sebesar 60,7% dan sisanya 39,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian. Hasil

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo dan Rahardjo (2010) yang melakukan penelitian karakteristik pemerintah daerah serta posisi keungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio efisiensi.

Karakteristik daerah yang digunakan adalah *size, wealth,* ukuran legislatif, *Leverege,* dan *Intergovermental Reveneu. Size* dan *wealth* mewakili karakteristik daerah yang dipakai oleh Sumarjo (2010) dalam penelitiannya. Sedangkan ROE mewakili posisi keuangan yang dipakai dalam penelitian Rahardjo (2010). Karakteristik dan posisi keuangan pemerintah daerah menjadi faktor yang mampu mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena karakteristik pemerintah daerah menjadi daya saing tiap daerah sesuai potensi yang dimiliki. Sedangkan posisi keuangan yang baik dari pemerintah daerah akan mendukung kualitas kinerja keuangan daerah termasuk dalam hasil opini audit BPK. Sampel penelitian ini menggunakan pemerintah daerah yang mendapat opini WTP sehingga posisi keuangan masuk dalam kategori baik.

PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi memiliki kinerja yang kurang efisien. Hal ini dapat dilihat pada sampel yang digunakan untuk data penelitian sebagian besar masuk dalam kategori kurang efisien. Pendapatan daerah yang diperoleh masih berada dibawah tingkat belanja daerah. Sehingga tingkat efisiensi kinerja keuangannya masih rendah.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas memiliki kinerja yang sangat efektif. Hal ini dapat dilihat pada sampel yang digunakan untuk data penelitian sebagian besar masuk dalam kategori sangat efektif. Sebagian besar pemerintah daerah mampu merealisasikan PAD diatas target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga daerah mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki.
3. ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan baik yang diukur dengan rasio efisiensi maupun rasio efektivitas. Hal ini karena nilai surplus dari pemerintah daerah yang dijadikan sampel masuk kategori rendah. Sehinga

akan berpengeruh positif terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah di tahun berikutnya.

4. Ukuran (*Size)* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk variabel kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Ukuran pemerintah daerah akan mempengaruhi tingkat belanja dan pendapatan daerah. Sehingga *Size* secara otomatis dapat berpengaruh terhadap tingkat efisiensi. *Size* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas. Ukuran pemerintah daerah belum bisa menjamin tercapainya realisasi PAD yang telah ditetapkan.
5. Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik yang diukur menggunakan rasio efisiensi maupun rasio efektivitas. Hal ini karena PAD dapat menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan kinerja keuangan serta kemandirian daerah.
6. ROE, ukuran, dan kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi variabel ROE, ukuran, dan kemakmuran memiliki pengaruh sebesar 55,5% dan Untuk kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas variabel ROE, ukuran, dan kemakmuran memiliki pengaruh sebesar 60,7%.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan adapun saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran Bagi Pihak Pemerintah

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemerintah daerah masih menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang efisien, maka diharapkan:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Memperkecil belanja yang kurang produktif diantaranya mengurangi porsi belanja pegawai yang paling besar menyedot APBD guna menciptakan efisiensi anggaran.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pendapatan dari tiap daerah hendaknya semakin dioptimalkan sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah yang telah berjalan diharapkan mampu menjadi pemacu tiap daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.

5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Untuk peneliti selanjutnya kinerja keuangan pemerintah daerah perlu ditinjau dari pengukuran lain selain rasio efisiensi dan efektivitas, yaitu pengukuran dengan rasio kemandirian, aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan variabel lain yang mendorong terjadinya kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga akan didapat model regresi yang lebih baik. Variabel lain yang dapat digunakan adalah variabel rasio keuangan lainnya diantaranya ROA, *Profit Margin*, dan *Current Ratio*.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu melakukan analisis perbandingan kinerja pemerintah daerah yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar) maupun TMP (Tidak Memberikan Pendapat).

PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. 2004. "Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan *Principal-Agent Theory*". *Makalah* disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.

Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. "Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. *Tesis.* Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Budi Santosa, Purbayu, Ashari. 2005. *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS.* Yogyakarta: Andi.

Cohen, Sandra dan Leventis, Stergios. 2010. "An Empirical Investigation of Audit Effort and Pricing in the Public Sector: The Case of Greek LGOs". SSRN November.

Cooke, T.E. 1992. *The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in The Annual Reports of Japanese Listed Companies.* Accounting and Business Research, Vol.19: 113-124.

Florida, Asha. 2006. "Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara". *Tesis.* Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: UNDIP.

Halacmi, Arie. 2005. *Performance Measurement is Only One Way of Managing Performance.* International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54: 502-516.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, Ardi. 2007. "Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan kemiskinan". Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XI.

Lesmana, Sigit Indra. 2010. "Pengaruh Karakteristik Daerah Terhadap Pengungkapan Wajib di Indonesia". *Tesis*. Surakarta: Fakultas Ekonomi UNS.

Mandell, Lee M. 1997. *Performance Measurements and Management Tools in North Carolina Local Goverment.* Public Administration Quarterly; Spring 1997; Vol. 21: 96.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nainggolan, Adolpino. 2008. "Analisa Laporan Keuangan Model *Dupont Analysis.* Jakarta: UMB.

Peraturan Pemerintah No.24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat.

Rahardjo, Wiharta. 2010. "Pengaruh Posisi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Tesis*. Surakarta: Fakultas Ekonomi UNS.

Ramasamy, Bala, Ong, Darryl, and Yeung, Mattew C H. 2005. *Firm Size, Owner Ship and Performance in The Malaysian Palm Oil Industry.* Asian Academy of Management Journal of Accounting, Vol. 1: 138-150.

Santoso dan Joni. 2011. *Teori Keagenan dalam Akuntansi.* http:/ www.akuntasiku.com/ talent/ ugm / muddex/ essay. (29 Desember 2012).

Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Sesotyaningtyas, Mirna. "Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, dan *Ingovernmental revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa". *Skripsi*. Semarang: Unnes.

Sumarjo, Hendro. 2010. "Pengaruh Karakteristik Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi UNS.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2009. Jakarta: Salemba Empat.

Wiratraman, Herlambang P. 2009. *Paradigma Hukum dan Demokratisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* http:/ www.akuntasiku.com/ talent/ ugm / muddex/ essay. (3 Desember 2012).

Yunanto. 2010. "*Intelectual Capital Disclosure* dan Karakteristik Pemerintah Daerah di Indonesia". *Tesis.* Surakarta: Fakultas Ekonomi UNS.

LAMPIRAN
Data Tahun 2009

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	S/D	Ekuitas	TA	PAD
1.	Kab.Aceh Tengah	13.029	1.604.235	1.625.642	21.969
2.	Kota Banda Aceh	-10.728	2.300.397	2.300.397	49.482
3.	Kota Langsa	3.599	696.915	726.428	12.843
4.	Kota Sabang	-11.449	1.091.299	1.091.299	15.143
5.	Kab. Tanah Datar	-16.485	821062	821.356	36.543
6.	Kota Sungai Penuh	14256	44.325	45.760	1.850
7.	Kab. Kaur	-19.769	642807	642.834	9.012
8.	Kab. Mukomuko	2.586	688.386	758503	8.973
9.	Kota Yogyakarta	-33.862	3.253.156	3.258.260	161.743
10.	Kab. Tangerang	-92.413	5.960.731	5.968.888	372.842
11.	Kota Tangerang	79.218	4.078.395	4.078.633	193.575
12.	Kab. Gorontalo	-27.363	1.376.150	1379.557	30.801

No.	Pemerintah Daerah	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
1.	Kab.Aceh Tengah	419.320	432.439	16.034	21.969
2.	Kota Banda Aceh	511.228	500.500	50.000	49.482
3.	Kota Langsa	340.116	343.766	24.442	12.843
4.	Kota Sabang	291.178	279.729	12.493	15.143
5.	Kab. Tanah Datar	555.488	539.003	31.757	36.543
6.	Kota Sungai Penuh	97.145	111.401	50.000	1.850
7.	Kab. Kaur	312.788	293.018	7.641	9.012
8.	Kab. Mukomuko	381.514	384.111	12.000	8.973
9.	Kota Yogyakarta	783.851	749.989	135.107	161.743
10.	Kab. Tangerang	2.015.224	1.922.811	312.578	372.842
11.	Kota Tangerang	1.103.605	1.182.823	181.989	193.575
12.	Kab. Gorontalo	551.436	524.073	24.896	30.801

Data Tahun 2010

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	S/D	Ekuitas	TA	PAD
1.	Kab.Aceh Tengah	-4.257	1.724.834	1.736.805	18.535
2.	Kab. Kaur	1.256	712.916	713.435	6.046
3.	Kab. Mukomuko	49.663	880.494	905.475	9.035
4.	Kab. Lampung Barat	-23.273	1.575.305	1.575.991	16.203
5.	Kab. Lampung Selatan	38.816	1.531.982	1.542.352	39.579
6.	Kab. Way Kanan	8.682	1.640.211	1.712.858	8.746
7.	Kota Bandar Lampung	38.898	1.974.514	1.985.276	86.692
8.	Kota Metro	-2.891	1.583.956	1.608.921	27.580
9.	Kab. Jepara	50.554	4.185.905	4.195.124	84.713
10.	Kota Surakarta	32.655	6.341.452	6.374.501	113.946
11.	Kota Yogyakarta	-24.371	3.241.311	3.245.300	179.424
12.	Kab. Bangkalan	111.359	1.942.266	1.944.089	40.975
13.	Kab. Tulungagung	7.994	1.440.880	1.441.208	94.380
14.	Kota Blitar	12.955	2.074.102	2.074.371	47.691
15.	Kota Mojokerto	-14.142	1.288.038	1.288.038	31.596
16.	Kota Tangerang	136.487	4.376.334	4.380.551	230.634
17.	Kota Sabang	-17.371	1.273.973	1.274.010	17.145
18.	Kab. Pacitan	18.135	1.503.614	1.503.900	29.488
19.	Kota Banda Aceh	10.344	3.105.074	3.105.074	61.794
20	Kab. Buton	11.473	1.129.760	1.136.041	17.631
21.	Kab. Gorontalo	25.422	1.507.227	1.510.976	28.168

PERPUSTAKAAN
UNNES

Data Tahun 2010

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Realisasi Penerimaan	Realisasi Pengeluaran	Target PAD	Realisasi PAD
1.	Kab.Aceh Tengah	474.810	470.553	18.535	20.467
2.	Kab. Kaur	314.893	316.419	6.046	11.001
3.	Kab. Mukomuko	347.987	397.650	9.035	25.789
4.	Kab. Lampung Barat	615.683	592.410	16.203	13.067
5.	Kab. Lampung Selatan	712.505	751.321	39.579	36.253
6.	Kab. Way Kanan	470.357	479.039	8.746	15.600
7.	Kota Bandar Lampung	920.171	959.069	86.692	75.032
8.	Kota Metro	429.391	426.500	27.580	25.179
9.	Kab. Jepara	852.318	902.872	84.713	71.081
10.	Kota Surakarta	825.859	858.514	113.946	120.183
11.	Kota Yogyakarta	839.866	815.496	179.424	178.761
12.	Kab. Bangkalan	793.792	905.151	40.975	35.356
13.	Kab. Tulungagung	1.099.341	1.107.335	94.380	70.955
14.	Kota Blitar	417.915	430.870	47.691	40.838
15.	Kota Mojokerto	403.716	389.574	31.596	29.519
16	Kota Tangerang	1.395.734	1.531.353	230.634	186.528
17.	Kota Sabang	330.429	313.058	17.145	13.628
18.	Kab. Pacitan	677.580	695.715	29.488	25.217
19.	Kota Banda Aceh	576.501	586.845	61.794	52.276
20	Kab. Buton	507.472	518.945	17.631	13.215
21.	Kab. Gorontalo	530.900	556.322	28.168	28.366

Data Variabel Independen dan Variabel Dependen
Tahun 2009 dan 2010

NO.	Pemerintah Daerah	ROE	TA	PAD	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas
1.	Kab.Aceh Tengah	0,008	1.625.642	21.969	0,970	1,070
2.	Kota Banda Aceh	-0,005	2.300.397	49.482	1,021	0,990
3.	Kota Langsa	0,005	726.428	92.843	0,989	1,025
4.	Kota Sabang	-0,010	1.091.299	115.143	1,041	1,212
5.	Kab. Tanah Datar	-0,020	821.356	136.543	1,031	1,151
6.	Kota Sungai Penuh	0,322	1.245.760	1.850	0,872	0,637
7.	Kab. Kaur	-0,031	2.642.834	179.012	1,067	1,179
8.	Kab. Mukomuko	0,004	1.758.503	128.973	0,993	1,020
9.	Kota Yogyakarta	-0,010	3.758.260	161.743	1,045	1,197
10.	Kab. Tangerang	-0,016	3.968.888	372.842	1,048	1,193
11.	Kota Tangerang	0,009	1.078.633	193.575	0,933	1,064
12.	Kab. Gorontalo	-0,020	1.379.557	180.801	1,052	1,237
13.	Kab.Aceh Tengah	-0,002	1.736.805	98.535	1,009	0,906
14.	Kab. Kaur	0,002	2.713.435	86.046	0,995	1,020
15.	Kab. Mukomuko	0,056	905.475	9.035	0,875	0,750
16.	Kab. Lampung Barat	-0,015	3.575.991	246.203	1,039	1,240

NO.	Pemerintah Daerah	ROE	TA	PAD	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas
17.	Kab. Lampung Selatan	0,025	1.542.352	39.579	0,948	0,992
18.	Kab. Way Kanan	0,005	1.712.858	8.746	0,982	0,860
19.	Kota Bandar Lampung	0,010	1.985.276	86.692	0,959	0,955
20	Kota Metro	-0,002	3.608.921	87.580	1,007	1,095
21.	Kab. Jepara	0,012	2.195.124	84.713	0,944	0,992
22.	Kota Surakarta	0,005	2.374.501	13.946	0,962	0,948
23	Kota Yogyakarta	-0,013	3.245.300	179.424	1,030	1,004
24.	Kab. Bangkalan	0,057	1.944.089	40.975	0,877	0,959
25.	Kab. Tulungagung	0,006	1.441.208	194.380	0,993	1,050
26.	Kota Blitar	0,006	2.074.371	47.691	0,970	0,968
27.	Kota Mojokerto	-0,001	4.288.038	81596	1,036	1,070
28.	Kota Tangerang	0,031	2.380.551	20.634	0,911	0,936
29.	Kota Sabang	-0,014	4.274.010	17.145	1,055	1,258
30.	Kab. Pacitan	0,012	1.503.900	29.488	0,974	0,969
31.	Kota Banda Aceh	0,003	1.105.074	11.794	0,982	0,879
32.	Kab. Buton	0,010	1.136.041	17.631	0,978	1,034
33.	Kab. Gorontalo	0,007	1.310.976	18.168	0,954	0,993

Output SPSS Model 1

Statistik Deskriptif

Statistics

		ROE	TA	PAD	Efisiensi	Efektivitas
N	Valid	33	33	33	33	33
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		.0132	2.1046E6	9.2569E4	.9861	1.0258
Std. Deviation		.05852	1.04521E6	8.47160E4	.05292	.13832
Minimum		-.03	7.26E5	1850.00	.87	.64
Maximum		.32	4.29E6	3.73E5	1.07	1.26

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03359626
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.079
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		.597
Asymp. Sig. (2-tailed)		.869

a. Test distribution is Normal.

Uji Multikolenieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.947	.015		61.602	.000		
	ROE	-.430	.115	-.475	-3.732	.001	.857	1.167
	TA	1.337E-8	.000	.264	2.082	.046	.864	1.158
	PAD	1.839E-7	.000	.294	2.246	.032	.809	1.236

a. Dependent Variable: Efisiensi

Uji Heteroskedastisits

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.030	.009		3.382	.002
	ROE	.094	.068	.264	1.395	.174
	TA	-3.704E-9	.000	-.185	-.984	.333
	PAD	2.164E-8	.000	.088	.451	.655

a. Dependent Variable: Abs_res

Analisis regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.947	.015		61.602	.000
	ROE	-.430	.115	-.475	-3.732	.001
	TA	1.337E-8	.000	.264	2.082	.046
	PAD	1.839E-7	.000	.294	2.246	.032

a. Dependent Variable: Efisiensi

Uji R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773[a]	.597	.555	.03529

a. Predictors: (Constant), PAD, TA, ROE

Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.053	3	.018	14.314	.000[a]
	Residual	.036	29	.001		
	Total	.090	32			

a. Predictors: (Constant), PAD, TA, ROE

b. Dependent Variable: Efisiensi

Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.947	.015		61.602	.000
	ROE	-.430	.115	-.475	-3.732	.001
	TA	1.337E-8	.000	.264	2.082	.046
	PAD	1.839E-7	.000	.294	2.246	.032

a. Dependent Variable: Efisiensi

Uji r

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	.947	.015		61.602	.000			
	ROE	-.430	.115	-.475	-3.732	.001	-.645	-.570	-.440
	TA	1.337E-8	.000	.264	2.082	.046	.484	.361	.245
	PAD	1.839E-7	.000	.294	2.246	.032	.551	.385	.265

a. Dependent Variable: Efisiensi

Output SPSS Model 2

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08257763
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.509
Asymp. Sig. (2-tailed)		.958

a. Test distribution is Normal.

Uji multikolenieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.932	.038		24.687	.000		
	ROE	-1.177	.283	-.498	-4.160	.000	.857	1.167
	TA	2.548E-8	.000	.193	1.614	.117	.864	1.158
	PAD	5.976E-7	.000	.366	2.970	.006	.809	1.236

a. Dependent Variable: Efektivitas

Uji Heteroskedastisits

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.070	.023		3.066	.005
	ROE	-.119	.170	-.139	-.701	.489
	TA	-4.530E-10	.000	-.009	-.048	.962
	PAD	-2.701E-8	.000	-.046	-.223	.825

a. Dependent Variable: Abs_rek

Analisis regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.932	.038		24.687	.000
	ROE	-1.177	.283	-.498	-4.160	.000
	TA	2.548E-8	.000	.193	1.614	.117
	PAD	5.976E-7	.000	.366	2.970	.006

a. Dependent Variable: Efektivitas

Uji R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802[a]	.644	.607	.08674

a. Predictors: (Constant), PAD, TA, ROE

Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.394	3	.131	17.456	.000[a]
	Residual	.218	29	.008		
	Total	.612	32			

a. Predictors: (Constant), PAD, TA, ROE

b. Dependent Variable: Efektivitas

Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.932	.038		24.687	.000
	ROE	-1.177	.283	-.498	-4.160	.000
	TA	2.548E-8	.000	.193	1.614	.117
	PAD	5.976E-7	.000	.366	2.970	.006

a. Dependent Variable: Efektivitas

Uji r

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	.932	.038		24.687	.000			
	ROE	-1.177	.283	-.498	-4.160	.000	-.675	-.611	-.461
	TA	2.548E-8	.000	.193	1.614	.117	.443	.287	.179
	PAD	5.976E-7	.000	.366	2.970	.006	.606	.483	.329

a. Dependent Variable: Efektivitas